

# IMPLEMENTASI PROGRAM BEDAH KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KALOSI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

<sup>1)</sup>Salina, <sup>2)</sup>Abdul Razak Useng, <sup>3)</sup>Andi Nilwana

Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

[salina@gmail.com](mailto:salina@gmail.com)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kalosi Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang, Populasi penelitian ini sebanyak 95 Orang. Teknik pengambilan sampel yang di gunakan adalah Random Sampling. Tipe penelitian ini adalah deskriptif Kuantitatif. Teknik pengumpulan data adalah Observasi, kuisioner, Dokumentasi, dan Wawancara. Teknik Analisis Data menggunakan analisis deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera meliputi komunikasi 67%, sumber daya 68%,disposisi 69%, struktur birokrasi 69%. Indikator Pemberdayaan Masyarakat 68%, meliputi kemampuan-kemampuan 71%,Kepercayaan 69%, wewenang 69%, Akuntabilitas 65%. Indikator Implementasi Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera yaitu 69%, kategori tergolong sesuai.

Kata Kunci : Implementasi Proram Bedah Kemiskinan, Pemberdayaan

## Abstract

*This study aims to determine the implementation of the Prosperous People Poverty Surgery Program on Community Empowerment in Kalosi Village, Dua Pitue District, Sidenreng Rappang Regency. The population of this study was 95 people. The sampling technique used is random sampling. This type of research is quantitative descriptive. Data collection techniques are observation, questionnaire, documentation, and interviews. The data analysis technique used descriptive analysis, data quality test, classical assumption test. The results showed that the implementation of the Prosperous People Poverty Surgery Program includes communication 67%, resources 68%, disposition 69%, bureaucratic structure 69%. Community Empowerment indicators 68%, covering abilities 71%, trust 69%, authority 69%, accountability 65%. The indicator for the implementation of the Prosperous People's Poverty Program is the category is classified as appropriate.*

*Keywords: Implementation of Poverty Surgical Procedures, Empowerment.*

## A. PENDAHULUAN

Upaya pengentasan kemiskinan “harus meningkatkan status ekonomi kaum wanita, khususnya dalam rangka mengurangi ketergantungan mereka pada metode-metode produksi yang tidak berkelanjutan atau yang kurang ramah terhadap lingkungan (Amalia, 2007:41)”. Menurut Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat, (2014: 13) “Pengertian pencapaian kesetaraan dan keadilan gender salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan pemihakan kepada perempuan. Pemihakan memberi makna berupaya memberikan kesempatan bagi perempuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, ekonomi dan politik serta mengakses dan memiliki kontrol atas aset produktif”.

Pemerintah terus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia, di mana hal ini mencapai 26,58 juta jiwa pada September 2017 (BPS 2018). Dibandingkan dengan tahun 2016, terjadi pengurangan sekitar 1,18 juta jiwa penduduk miskin pada tahun 2017, padahal sebelumnya rata-rata penurunan kemiskinan hanya kurang dari 500 ribu orang per tahun. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas dalam Rencana Kerja Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan di bawah 10 persen. Faktor pendorong penurunan angka kemiskinan ini antara lain adalah inflasi yang terjaga dan stabil, meningkatnya upah riil buruh tani, dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah. Integrasi program-program penanggulangan kemiskinan yang dimaksud meliputi: (1) Perbaikan basis data untuk target dan penyaluran non tunai melalui satu kartu; (2) Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) yang terintegrasi dengan bantuan lain untuk mendorong akumulasi aset/tabungan dan akses layanan lainnya; (3) Reformasi subsidi pangan dan energi tepat sasaran; serta (4) Optimalisasi penggunaan dana desa yang turut menurunkan kemiskinan di wilayah pedesaan. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah meluncurkan sebuah program guna mengentaskan kemiskinan yang disebut Program BEKERJA atau Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera. Program ini menjangkau desa di 100 kabupaten dan 10 provinsi. Program BEKERJA merupakan bagian program padat karya tunai, berbasis usaha pertanian. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi permanen pengentasan

kemiskinan dengan 3 jenis bantuan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA) yang baru di laksanakan di Awal Tahun 2019, Dimana Pemerintah Desa Kalosi Membagikan Ayam Arab Petelur secara gratis Kepada Masyarakat yang Berhak. Pemerintah juga memberikan modal sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk membuat Kandang serta memberikan pangan secara gratis. Tetapi terdapat kendala dalam impelentasi program tersebut, misalnya masyarakat belum mengetahui cara merawat ayam tersebut, ayam yang dibagikan masih berumur muda sehingga rentang sakit bahkan mati. Sehingga Setelah Sebulan Masyarakat Diberikan Ayam Kebanyakan Ayam Mereka Mati. Padahal tujuan program tersebut adalah dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat miskin. Sehingga jika masalah tersebut terus berlanjut maka program tersebut tidak dapat mencapai tujuannya bahkan tidak bisa termasuk program jangka panjang.

Implementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul suatu keputusan. Suatu keputusan selalu dimaksudkan untuk mencapai sasaran tertentu. Parson dalam Ahmad (2011:73) “implementasi adalah pelaksanaan pembuat kebijakan dengan cara-cara lain sedangkan Gordon mengemukakan implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Berbagai kegiatan berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program”. Merilee S. Grindle (Subarsono, 2016:93) menyatakan bahwa “keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (contexr of implementation)”

Edward III yang mengemukakan bahwa “implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu (Ahmad, 2011:84): komunikasi (communication), sumber daya (resource), disposisi (attitude), dan struktur birokrasi (Attitude)”.

Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian yang

Selanjutnya disebut Program Bekerja adalah upaya untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan melalui kegiatan pertanian yang terintegritasi (Permentan No. 20 Pasal 1 Ayat, hal. 5). Adapun Kriteria dalam Pelaksanaan Bekerja di Kabupaten Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM), Memiliki Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Komoditas dan Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Sedarmayanti, (2016:309) "Empoweing artinya is passing on authority and responsibility yaitu lebih berdaya dari sebelumnya dalam arti wewenang dan tanggung jawabnya termasuk kemampuan individual yang dimilikinya". Hikmat dalam Makmur (2008:47) mengemukakan bahwa "strategi pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya bertumpu pada pendekatan partisipatif pada semua pihak, penguatan kemampuan, dan pendelegasian wewenang kepada masyarakat, serta aktualisasi institusi tradisi dalam pendayagunaan potensi diri dan sosial yang dimilikinya".

Pemberdayaan sumberdaya manusia adalah suatu proses kegiatan usaha untuk lebih memberdayakan "dayamanusia" melalui perubahan dan pengembangan manusia itu sendiri berupa kemampuan, kepercayaan, wewenang, dan tanggung jawab dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi untuk meningkatkan kinerja sebagaimana yang diharapkan yaitu, Kemampuan, Kepercayaan, Wewenang, dan Tanggung Jawab. (Sedarmayanti, 2016:310),

## B. METODE PENELITIAN

Desain penelitian kuantitatif pada dasarnya meliputi penentuan pemilihan subjek dari mana informasi atau data diperoleh, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, serta perlakuan yang diselenggarakan. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan jumlah Masyarakat yang Menerima Ayam Arab Petelur di Desa Kalosi yaitu sebanyak 95 Orang,

Teknik pengambilan sampel yang diambil adalah *probability sampling* yaitu pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur

(anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono,2007:52). hasil perhitungan, maka peneliti menentukan jumlah sampel yaitu 49 orang. Teknik pengumpulan yang digunakan yaitu melalui Observasi, Kuesioner, Dokumentasi dan Wawancara, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa jawaban dari 49 responden yaitu 5 atau 10% sangat sesuai, 10 atau 21% sesuai, 31 atau 63% kurang sesuai, 3 atau 6% tidak sesuai dan tidak ada atau 0% sangat tidak sesuai. Hasil ideal yaitu 67% maka komunikasi berada pada kategori sesuai. Desa Kalosi ayam arab dibagikan di tahun 2019 akhir tahun, yang dibagikan ayam arab petelur data nama-namanya berasal dari pusat bukan dari desa.

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa jawaban dari 59 responden yaitu 6 atau 12% sangat sesuai, 8 atau 16% sesuai, 35 atau 72% kurang sesuai, tidak ada atau 0% tidak sesuai dan sangat tidak sesuai. Hasil ideal yaitu 68% maka sumber daya berada pada kategori sesuai. Kelancaran Program ini terdapat dua orang yang dijadikan kordinator, data penerima ayam arab petelur terdapat 94 KK sebesar 50 Ekor/KK dengan umur ayam satu bulan dan diberikan pangan sebanyak 3 karung, cairan penyemprot ayam dan kandang".

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa jawaban dari 59 responden yaitu 8 atau 16% sangat sesuai, 9 atau 19% sesuai, 30 atau 61% kurang sesuai, 2 atau 4% tidak sesuai dan tidak ada atau 0% sangat tidak sesuai. Hasil ideal yaitu 69% maka disposisi berada pada kategori sesuai. Ayam Arab Petelur tahun 2019 sudah tersalurkan semua kepada orang-orang yang ada namanya dari pusat, penerimaannya dilaksanakan di kantor desa, namun untuk keberhasilannya ayam arab tersebut sebenarnya tidak cocok dengan iklim dan cuaca di sini jadi ayamnya banyak yang mati, hanya ada satu atau dua KK itu yang berhasil sampai setengah jumlah ayamnya yang hidup atau bertahan.

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa jawaban dari 59 responden yaitu 3 atau 6% sangat sesuai, 19 atau 39% sesuai,

25 atau 51% kurang sesuai, 2 atau 4% tidak sesuai dan tidak ada atau 0% sangat tidak sesuai. Hasil ideal yaitu 69% maka struktur birokrasi berada pada kategori kurang sesuai. Keberlanjutan dari program ini kordinator sering mengontrol, cara memberi makan , cara merawat kandang dan ayam. Tapi Masalah keberlanjutan pemberian bantuan ayamnya itu tidak ada lagi.

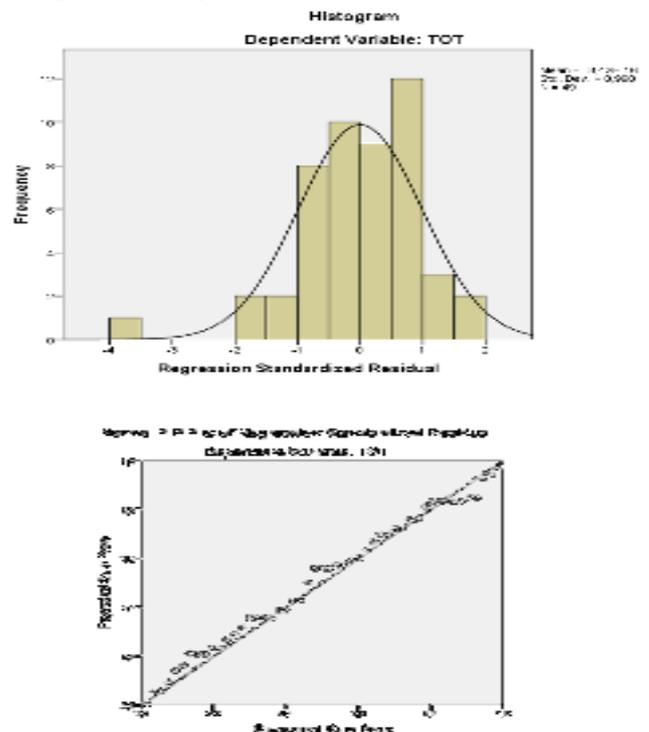
Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa jawaban dari 59 responden yaitu 6 atau 12% sangat sesuai, 22 atau 45% sesuai, 14 atau 29% kurang sesuai, 6 atau 27% tidak sesuai dan 1 atau 2% sangat tidak sesuai. Hasil ideal yaitu 71% maka kemampuan berada pada kategori kurang sesuai. Kendala dalam program ini yaitu datanya berasal dari pusat jadi kami merasa bahwa program ini tidak merata karna masih ada masyarakat yang berhak menerima.

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa jawaban dari 59 responden yaitu 4 atau 12% sangat sesuai, 18 atau 45% sesuai, 24 atau 29% kurang sesuai, 2 atau 12% tidak sesuai dan 1 atau 2% sangat tidak sesuai. Hasil ideal yaitu 69% maka kepercayaan berada pada kategori sesuai. Harapan kami itu jelas dari program ini yaitu pertama itu untuk menambah penghasilan atau kebutuhan masyarakat terkait kegiatan ini karena jika ayamnya bertelur itu bias dijual hanya karna ayamnya banyak mati jadi program ini kurang berhasil mengingat iklim dan cuaca di sini.

Hasil pengolahan data di atas menunjukkan bahwa jawaban dari 59 responden yaitu 7 atau 14% sangat sesuai, 15 atau 31% sesuai, 23 atau 47% kurang sesuai, tidak ada atau 0% tidak sesuai dan 4 atau 8% sangat tidak sesuai. Hasil ideal yaitu 69% maka wewenang berada pada kategori sesuai. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa yang menerima itu kami selaku pemerintah desa itu kewalahan memberikan alasan karna data yang dari pusat itupun karna adanya data yan dilakukan oleh daerah khususnya Desa Kalosi cuman proses dan seleksi sehingga terdapat nama-nama tersebut kami tidak mengetahui.

Hasil pengolahan data di atas menunjukkan bahwa jawaban dari 59 responden yaitu 3 atau 6% sangat sesuai, 11 atau 23% sesuai, 31 atau 63% kurang sesuai, 3 atau 6% tidak sesuai dan 1 atau 2% sangat tidak sesuai. Hasil ideal yaitu 65% maka

akuntabilitas berada pada kategori sesuai. Pemberian program kepada masyarakat pemerintah memperhatikan kondisi geografis dan penduduk, cocok atau tidak, jika tidak cocok diberikan program yang lebih cocok sehingga masyarakat dapat menggunakan sumber dayanya secara maksimal dan dapat menambah penghasilan terutama kesejahteraannya.



Output di atas diketahui bahwa grafik normal P-P Plot hasil olah data, maka model regres dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas yakni data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka resgresi memenuhi asumsi normalitas.

Program bantuan ayam arab petelur itu tidak sesuai dengan iklim dan cuaca di Desa Kalosi sehingga baru berjalan 1 bulan ayamnya banyak mati dan tidak bertahan . Pusat hanya menurunkan bantuan yang merata d seluruh Indonesia tanpa memperhitungkan kondisi geografi suatu daerah. Tahir (2015:63-64) "salah satu syarat utama agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif adalah mengetahui apa yang harus dilakukan. Sebuah kebijakan dan instruksi implementasi harus ditransmisikan kepada personel-personel yang tepat sebelum dilaksanakan. Ketika program tidak sesuai dengan kondisi geografi dan penduduk daerah itu hanya akan

menhabiskan dana dan pemberdayaan dan kesejahteraan tidak meningkat terkait pelaksanaan program ini”.

Sanders (Mulyana, D;dkk, 2013:33) “dalam menganalisa pembangunan masyarakat kita bisa melihat komunikasi dari empat perspektif yaitu proses, metode, program dan gerakan sosial. Komunikasi sebagai proses harus kita pelajari misalnya melalui prinsip dan teori perubahan sosial, kebudayaan implisit dan eksplisit, dinamika hubungan silang budaya termasuk kooperasi-akomodasi-persaingan-konflik, teori sosialisasi dan enkulturasi (pemasyarakatan dan pembudayaan). Komunikasi sebagai metode melalui teori kontrol sosial, teori pengembangan masyarakat, teori belajar, teori formasi dan perubahan sikap, kecenderungan perilaku, motivasi dan kognisi termasuk teori selektivitas dan perbedaan individu. Komunikasi sebagai program dengan memanfaatkan dan memperkembangkan teori dinamika kelompok, teori manajemen, analisis sistem, teori dan teknik evaluasi dan pengukuran untuk mengetahui hasil (output) dan dampak (impact). Komunikasi sebagai gerakan sosial antara lain meminta pertolongan teori-teori sosiologi, politik, psikologi sosial khususnya psikologi massa termasuk pendapat umum, perilaku kelompok dan perilaku massa”.

Ahmad (2011:86) “Personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumber daya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumber daya ini meliputi staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Melihat dari kewalahannya Staf Desa terutama kordinator program ini membuat sumber daya tidak maksimal terkait pemahaman program pemerintah yang berasal dari pertimbangan pusat bukan berasal dari daerah sehingga pusat itu tidak mengetahui masyarakat yang benar-benar berhak dan tidak menerima bantuannya.Selain itu masyarakat kurang memahami mengenai berternak ayam petelur yang berakibat banyak ayam yang mati”.

Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memuaskan kepuasannya (Hasibuan 2016:244). Kenyataanya dilapangan masyarakat Desa Kalosi tidak mempunyai kemampuan untuk mengembangbiakkan ayam tersebut dan membuat semakin berproduksi malahan banyak ayam yang mati dan tidak bias dijadikan penghasilan.

bentuk sikap/responden implementor terhadap kebijakan; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan dan intensitas dari respon.Kesadaran masyarakat dalam penerimaan bantuan dari pusat ini sangatlah baik, karna banyak masyarakat yang tidak menerima dan menurut mereka berhak menerimanya itu langsung ke kantor desa untuk mempertanyakan program tersebut. Walaupun pemerintah desa tidak bias mengambil kewenangan terkait nama-nama penerima karna data berasal dari pusat yang tidak bias di ubah”.

Depdagri-LAN dalam Cangara(2010:25) “sikap dasar dalam berkomunikasi yang penting untuk dikuasai adalah sikap empatik. Sikap empatik ini, sering disebut dengan prinsip platina (platinum principle), untuk menunjukkan nilai yang lebih tinggi dari sikap empatik, yang sering disebut sebagai prinsip emas (golden principle). Sikap seperti inilah yang cocok diterapkan dalam komunikasi yang mengandung kesetaraan gender karena komunikasi seperti ini menempatkan siapapun dalam perspektif harus kita pahami dengan informasi yang cukup jika komunikasi kita ingin efektif, tidak peduli apapun atribut sosialnya, termasuk perbedaan gender, sementara yang harus dihindari adalah sikap apatis”.

badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Kordinator program ini dipilih dari staf desa dan mengetahui kondisi geografis dan penduduk di Desa Kalosi.Hanya saja

korinator hanya dua orang dan itu tidak cukup untuk mengontrol setiap saat penerima ayam karena terdapat 94 KK serta ayam tersebut merupakan ayam yang baru dikembangkan sehingga kordinator maupun masyarakat kurang memahami dalam merawat ayam tersebut”.

Para pelaksana kebijakan akan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai keinginan dan sumber daya untuk melakukan kebijakan, tetapi mereka akan tetap dihambat proses implementasinya oleh struktur organisasi yang mereka layani. Asal usul karakteristik organisasi, fragmentasi birokrasi yang berbeda akan menghambat implementasi yang diharapkan, menghambat koordinasi, akibat proses kebijakan pada maksud yang berlawanan dan sebab kebijakan yang gagal” (Tahir, 2015:71). Kenyataannya pemerintah dan masyarakat tidak mengetahui pertimbangan yang dapat membuat seseorang untuk menerima bantuan tersebut. Masyarakat menganggap data tersebut masih tidak sesuai dengan kondisi dan penduduk Desa Kalosi.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa indikator kemampuan, kepercayaan, wewenang dan tanggung jawab yang terkait pemberdayaan masyarakat berada pada kategori sesuai, hanya saja itu belum sesuai dengan harapan yaitu 100%. Indikator yang melebihi 70% hanyalah kemampuan yang lainnya dibawah 70%.

Kemampuan merupakan sebuah kapasitas yang dimiliki oleh tiap-tiap individu untuk melaksanakan tugasnya. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kemampuan merupakan suatu penilaian atau ukuran dari apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Kenyataannya Kordinator yang ditunjuk untuk mengontrol program pemberian ayam arab petelur tidak mempunyai kemampuan dalam menyukseskan kegiatan yang menjadi tujuan dari program tersebut yaitu untuk mensejahterakan masyarakat dengan menambah penghasilan. Masyarakat juga kurang memahami dalam mengembangkan ayam tersebut dalam menghasilkan telur yang bias dijual karena banyak ayam yang mati. Buktinya hanya ada satu atau dua orang yang bertahan merawat ayamnya itupun hanya setengah. Ini membuktikan bahwa terkait kemampuan baik kordinator maupun penerima sama-sama kurang dan perlu bimbingan.

Kepercayaan adalah suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran. Karena keyakinan merupakan suatu sikap, maka keyakinan seseorang tidak selalu benar atau keyakinan semata bukanlah jaminan kebenaran.

Pemerintah dan kordinator menyerahkan sepenuhnya urusan perawatan ayam kepada penerima setelah diberikan ayam. Walaupun ditengah menjalankan kegiatan banyak ayam yang mati karena memang umur ayam yang masih muda dan rentang terkena penyakit. Nama-nama penerima ayam yang berasal dari pusat pemerintah desa tidak mengubahnya walaupun banyak masyarakat mempertanyakan mengenai proses dan bagaimana agar mereka juga mendapatkan bantuan. Pemerintah atau kordinator tidak berwenang mengubah jadi mereka menyalurkan semua ayam tersebut kepada orang-orang yang ada namanya.

Otoritas atau wewenang selalu mengalir dari atas ke bawah. Ini berarti seorang atasan harus menjelaskan dengan jelas bagaimana bawahannya melakukan pekerjaan yang didelegasikannya serta menjelaskan apa yang diharapkan dari pendelegasian wewenang tersebut agar dapat menerima hasil kerja sesuai dengan harapan dan keinginannya. Otoritas atau Wewenang harus disertai dengan tanggung jawab yang sama. Mendelegasikan wewenang kepada orang lain tidak berarti keluar dari akuntabilitas. Akuntabilitas masih melekat pada orang yang memiliki wewenang tertinggi. Wewenang kordinator dan pemerintah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Terbukti saat data nama-nama penerima ayam arab tersebut diberikan oleh pusat mereka langsung menghubungi pihak yang bersangkutan dan mengecek keberadaan orang-orang tersebut. Dan ketika ada masyarakat yang merasa pantas menerima karena alasan miskin datang ke kantor untuk meminta diberikan juga bagian pemerintah dan kordinator tidak langsung mengubah data tersebut malahan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait data nama-nama yang menerima tersebut.

Tanggung Jawab tanpa wewenang atau otoritas yang memadai dapat menyebabkan ketidakpuasan dan kesulitan

dalam melaksanakan tugasnya. Seseorang memiliki tanggung jawab atas pekerjaan yang dibebankannya. Jika melakukan tugasnya dengan baik maka orang yang bersangkutan akan mendapatkan pujian ataupun penghargaan. Namun apabila tidak menyelesaikan tugas yang ditetapkan seperti yang diharapkan, maka dia juga bertanggungjawab sepenuhnya. Hasil penelitian kordinator yang diberi tugas oleh pemerintah desa untuk mengontrol masyarakat penerima ayam arab petelur memberikan itu menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan. Dalam mengontrol kordinator sering turun mengecek kegiatan perawatan ayam, jumlah ayam yang mati atau bertahan setiap minggu, Sehingga masyarakat yang diberikan ayam juga bertanggungjawab merawat ayam tersebut walaupun kenyataannya banyak yang mati dan tidak bertahan dikarenakan cuaca dan iklim di Desa kalosi serta umur ayam yang masih rentang penyakit, pangan yang tidak cocok dengan ayam tersebut.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah di uraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi program bedah kemiskinan rakyat sejahtera yaitu 69% dari 100% hasil yang diharapkan dimana ini tergolong sesuai. Indikator Komunikasi 67%, sumberdaya 68%, disposisi/attitude 69% dan struktur birokrasi 69% dengan hasil beradap ada kategori sesuai namun hasilnya masih jauh dari 100%.
2. Pemberdayaan masyarakat yaitu 68% dari 100% hasil yang diharapkan dimana ini tergolong sesuai. Indikator Kemampuan 71%, kepercayaan 69% , wewenang 69% dantanggungjawab 65% dengan hasil berada pada kategori sesuai namun hasilnya jauh dari 100%.
3. Implementasi program bedah kimiskinan rakyat sejahtera terhadap pemberdayaan masyarakat yaitu 68% dari 100% hasil yang diharapkan berada pada kategori sesuai.

#### E. REFERENSI

Agustino, L. 2012. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.

Ahmad, J. 2011. Perilaku Birokrasi dan Pengambilan Keputusan. UNM: Makassar.

\_\_\_\_\_. 2015. Metode dan Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi. Gava Media: Yogyakarta.

Amalia, L. 2007. Ekonomi Pembangunan. Graha Ilmu: Yogyakarta.

Arikunto, S. 2013. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.

Rineka Cipta: Jakarta.

Badeni. 2014. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Alfabeta: Bandung.

Canggara, H. 2010. Pengantar Ilmu Komunikasi. Rajawali Pers. Jakarta

Dwidjowijoto, R.N. 2004. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Elex Media Komputindo: Jakarta.

Hardiyansyah. 2015. Komunikasi Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi. Gava Media: Yogyakarta.

Harun, R; Ardianto, E. 2011. Komunikasi Pembangunan Perubahan Sosial Perspektif dominan, Kaji Ulang dan Teori Kritis. Rajawali Pers: Jakarta.

Indrawijaya, A.I. 2009. Perilaku Organisasi. Sinar Baru Algensindo: Bandung.

Kumorotomo, W. 2008. Akuntabilitas Birokrasi Publik Sketsa pada Masa Transisi. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Mangkunegara, P.A. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Remaja Rosdakarya: Bandung.

Makmur, S. 2008. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektivitas

Organisasi. Rajawali Pers: Jakarta.

Muchlas, M. 2012. Perilaku Organisasi. Gadjah Mada University: Yogyakarta.

Muhammad, A. 2014. Komunikasi Organisasi. Bumi Aksara: Jakarta.

Mulyana, D; dkk. 2013. Ilmu Komunikasi Sekarang dan Tangangan Masa Depan. Kencana: Jakarta.

Mulyadi, D. Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan. Alfabeta: Bandung.

- Nugroho, R. 2006. Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang. Gramedia: Jakarta.
- Purwanto, E.A; Sulistyastuti, D.R. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif untuk Administrasi Publik dan Masalah-masalah Sosial. Gava Media: Yogyakarta.
2015. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan aplikasinya di Indonesia. Gava Media: Yogyakarta.
- Riduwan. 2013. Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian. Alfabeta: Bandung.
- Salusu. 2008. Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit. Gramedia: Jakarta
- Sedarmayanti. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Refika Aditama: Bandung.
- Sellang, K. 2016. Administrasi dan Pelayanan Publik Antara Teori dan Aplikasi. Ombak: Yogyakarta.
- Siagian, S.P. 2012. Teori Pengembangan Organisasi. Bumi Aksara: 2012.
- Subarsono, 2016. Analisis Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Sulistiyani, A.T. 2004. Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan. Gava Media: Yogyakarta.
- Sugiyono. 2007. Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta: Bandung.
- \_\_\_\_\_ 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D. Alfabeta: Bandung.
- \_\_\_\_\_ 2015. Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods). Alfabeta: Bandung.
- Suryabrata, S. 2014. Metodologi Penelitian. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Tahir, A. 2015. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Alfabeta: Bandung.